

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis merupakan titik penentu atau momentum yang dapat mengarah pada kehancuran atau kejayaan. Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 dan 2008 merupakan pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian di Indonesia, dan hampir semua pasar keuangan dunia terkena imbas krisis finansial. Karena itu para pengamat menyebut krisis ini sebagai krisis finansial global (Gatot, 2013).

Kondisi perekonomian global yang masih mengalami tekanan akibat krisis menghadapkan perekonomian Indonesia pada beberapa tantangan yang tidak ringan sepanjang tahun 2009. Sejumlah kebijakan telah ditempuh Bank Indonesia dan pemerintah untuk menghadapi tantangan sepanjang tahun 2009 tersebut. Kebijakan Bank Indonesia di bidang Perbankan diarahkan untuk memperkuat daya tahan industri Perbankan dengan tetap melanjutkan upaya-upaya untuk meningkatkan peran Intermediasi Perbankan, dimana Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi sebagai lembaga perantara antara pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) yang menyimpan kelebihan dananya di bank dengan pihak yang kekurangan dana (*deficit unit*) yang meminjam dana ke bank. Fungsi intermediasi ini akan berjalan baik apabila *surplus unit* dan *deficit unit* memiliki kepercayaan terhadap bank. Berjalannya fungsi

intermediasi perbankan akan meningkatkan penggunaan dana. Dana yang telah dihimpun kemudian akan disalurkan ke masyarakat dalam berbagai bentuk aktivitas produktif. Aktivitas produktif ini kemudian akan meningkatkan *output* dan lapangan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Muharam dan Purvitasari, 2007).

Bank Indonesia (2002), menyebutkan dalam periode tersebut pula banyak lembaga-lembaga keuangan, termasuk perbankan mengalami kesulitan keuangan. Tingginya tingkat suku bunga telah mengakibatkan tingginya biaya modal bagi sektor usaha yang pada akhirnya mengakibatkan merosotnya kemampuan sektor usaha produksi. Sebagai akibatnya, kualitas aset perbankan turun secara drastis sementara sistem perbankan diwajibkan untuk terus memberikan imbalan kepada depositor sesuai dengan tingkat suku bunga pasar. Rendahnya kemampuan daya saing usaha sektor produksi telah menyebabkan berkurangnya peran sistem perbankan secara umum untuk menjalankan fungsinya sebagai mediator kegiatan investasi.

Selama krisis ekonomi tersebut, perbankan syariah masih dapat memenuhi kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan perbankan konvensional. Bank Indonesia (2002) menjelaskan bahwa kondisi ini dapat dilihat dari kecilnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah (*non performing financing*) pada perbankan syariah dan tidak terjadinya *negative spread* dalam kegiatan operasionalnya.

Tabel 1.1
Non Performing Financing (NPF) Bank Syariah di Indonesia

Periode	NPF (%)
2009	4.01%
2010	3.02%
2011	2.52%
2012	2.22%
2013	2.62%
2014	3.21%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah BI 2009–2014

Dari data statistik yang tercantum dalam tabel dapat diketahui terjadi penurunan NPF dari tahun 2009 sebesar 4,01 persen menjadi 3,21 persen pada tahun 2014. Tingkat penurunan NPF tersebut dapat dipahami mengingat tingkat pengembalian pada bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga yang berlaku tetapi menurut prinsip bagi hasil. Dengan demikian bank syariah dapat menjalankan kegiatannya tanpa terganggu dengan kenaikan tingkat suku bunga yang terjadi, sehingga perbankan syariah mampu menyediakan modal investasi dengan biaya modal yang relatif lebih rendah dari bank konvensional kepada masyarakat.

Untuk mensiasati perkembangan perbankan syariah di masa mendatang, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya UU No. 7 tahun 1992 dan diamandemen dengan UU No. 10 tahun 1998. Dan pada tahun 1999 di keluarkan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan regulasi

terbaru yang mengatur secara khusus mengenai perbankan syariah melalui UU No.21 Tahun 2008.

Berikut ini disajikan tabel perkembangan jumlah bank syariah di Indonesia sejak tahun 1992 hingga 2014 berdasarkan data dari Bank Indonesia.

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah Bank Syariah di Indonesia

Tahun	Jenis Bank		
	Bank Umum Syariah	Unit Usaha Syariah	Bank Perkreditan Rakyat Syariah
1992	1	-	-
1998	1	-	76
2000	2	3	78
2002	2	6	83
2003	2	8	84
2005	3	19	92
2006	3	20	105
2007	3	26	114
2008	5	27	131
2009	6	25	138
2010	11	23	150
2011	11	24	155
2012	11	24	158
2013	11	23	160
2014	12	22	163

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2014

Berdasarkan tabel tersebut yang menunjukkan bahwa pertumbuhan perbankan syariah nasional yang relatif cepat setelah dikeluarkannya peraturan yang mengatur tentang perbankan syariah, maka Biro Perbankan Syariah dari Bank Indonesia sejak tahun 2001 telah melakukan kajian dan

menyusun cetak biru (*blue print*) Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia untuk periode 2002-2011. Adapun cetak biru ini disusun dengan tujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama yang akan dihadapi oleh industri perbankan syariah pada tahun-tahun mendatang (Bank Indonesia, 2002).

Dengan semakin banyaknya jumlah bank syariah yang beroperasi khususnya dalam bentuk Bank Umum Syariah di Indonesia dengan berbagai bentuk produk dan pelayanan yang diberikan dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat. Permasalahan yang paling penting adalah bagaimana kualitas kinerja dan kesehatan dari bank umum syariah yang ada saat ini di Indonesia. Dan adanya fakta yang mencengangkan dari sebuah artikel bahwa Bank Indonesia (BI) meminta perbankan syariah meningkatkan efisiensi agar mampu bersaing dengan bank syariah dari negara lain di ASEAN. Ini untuk mengantisipasi pelaksanaan masyarakat Ekonomi ASEAN mulai tahun 2015 mendatang. Riset BI terhadap tiga bank syariah terbesar Indonesia yang dipublikasikan pada tahun 2012 menunjukkan, rata-rata rasio biaya operasional (BOPO) bank syariah di Indonesia mencapai 86,87 persen. Adapun BOPO bank syariah di Malaysia 44,46 persen dan bank negara kawasan Timur Tengah 37,06 persen. Bank Syariah di negeri ini mampu bersaing dari sisi return on asset (ROA), return on equity (ROE) dan net interest margin (NIM). Perbankan syariah di Indonesia menjanjikan keuntungan paling baik ketimbang negara lain. Jumlah penduduk muslim banyak dan kontribusi ke

perekonomian masih sangat kecil. Artinya, peluang bertumbuh masih lebar dan peningkatan kapasitas itu akan cepat tercapai jika bank syariah mampu menaikkan daya saing (www.syariahmadiri.co.id).

Perkembangan selanjutnya, muncul pula konsep *office channelling* yang intinya menyatakan bahwa bank-bank konvensional diperbolehkan membuka *counter-counter* syariah dalam operasional usahanya. Konsep *office channelling* yang diatur dalam PBI No. 8/3/PBI/2006 menjadikan perkembangan perbankan syariah akan lebih mudah. UU No. 21 Tahun 2008 yang mengatur tentang operasional perbankan syariah di Indonesia juga dikeluarkan dan diperbaharui kembali, dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/3/PBI/2009 yang memuat tentang prosedur dan aturan dalam mendirikan kantor cabang dan membuat perkembangan jumlah kantor layanan bank syariah bertambah dengan pesat (Heri dan Iis Sugianto, 2011: 109).

Tabel 1.3
Perkembangan Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2009-2014

Indikator	Tahun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Dana Pihak Ketiga (DPK)	52,271	60,450	91,032	124,356	164,817	193,911
Modal Disetor	1,946	4,068	6,254	6,956	7,847	9,719
Penempatan pada Bank Indonesia (PBI)	10,393	10,223	15,432	20,161	25,290	31,412
Penempatan pada Bank Lain (PBL)	3,036	3,500	3,749	5,101	5,846	6,660
Pembiayaan	46,886	56,874	84,993	121,111	169,500	191,487
BOPO	84,39%	80,54%	78,41%	74,97%	79,06%	91,90%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2014, diolah (dalam miliar)

Keterangan : *) Data meliputi BUS dan UUS (tidak termasuk BPRS)

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat diketahui bahwa kinerja perbankan syariah terus mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari indikator kenaikan jumlah DPK, Modal Disetor, Penempatan pada Bank Lain, dan Pembiayaan dari tahun 2009-2014. Sedangkan penempatan pada Bank Indonesia mengalami penurunan yang tidak signifikan ditahun 2010, namun kinerjanya masih tergolong relatif baik. Tetapi didapatkan fakta bahwa rasio BOPO BUS dan UUS mengalami fluktuasi. Selama 4 tahun berturut-turut BOPO BUS dan UUS mengalami penurunan dari 84,39 persen menjadi 74,97 persen, kecuali tahun 2013 mengalami kenaikan tetapi tidak signifikan yaitu sebesar 79,06 persen. Hal ini menunjukkan bahwa BUS dan UUS mengalami inkonsistensi dalam hal efisiensi kegiatan operasionalnya.

Berdasarkan paparan diatas, maka penilaian mengenai efisiensi perbankan khususnya perbankan syariah perlu dikaji ulang dengan tidak melihat dari BOPOnya lagi, akan tetapi dengan *input-output* yang lain. Dikarenakan efisiensi merupakan gambaran kinerja suatu bank sekaligus menjadi faktor yang harus diperhatikan bank untuk bertindak rasional dalam meminimumkan tingkat risiko yang dihadapi dalam menghadapi kegiatan operasinya.

Menurut Suswadi (2007) perbankan syariah sebagai bagian dari industri perbankan nasional memiliki peran yang tidak berbeda dengan bank konvensional lainnya. Selain sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional, bank syariah juga dituntut untuk dapat

menyalurkan dana dari nasabah yang berlebihan kepada nasabah yang membutuhkan dana secara efektif dan efisien. Efektif lebih memiliki arti sebagai ketepatan pemberian pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan, sedangkan efisien lebih memiliki arti kesesuaian hasil antara input yang digunakan dan output yang dihasilkan.

Efisiensi dalam dunia perbankan merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis merupakan salah satu kinerja yang mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi. Kemampuan menghasilkan *output* yang maksimal dengan *input* yang ada merupakan ukuran kinerja yang diharapkan. Pada saat pengukuran efisiensi dilakukan, bank dihadapkan pada kondisi bagaimana mendapatkan tingkat *output* yang optimal dengan tingkat *input* yang ada, atau mendapatkan tingkat *input* yang minimum dengan tingkat *output* tertentu. Dengan diidentifikasinya alokasi *input* dan *output*, dapat dianalisa lebih jauh untuk melihat penyebab ketidakefisiensian. Industri perbankan adalah industri yang paling banyak diatur oleh peraturan-peraturan yang sekaligus menjadi ukuran kinerja dunia perbankan, seperti *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Reserve Requirement*, dan lain-lain. Pada perbankan ada dua pendekatan kinerja secara ekonomi yaitu kinerja keuangan dan kinerja efisiensi. Untuk mengukur kinerja keuangan alat yang biasa digunakan adalah rasio keuangan (CAMEL), sedang untuk mengukur tingkat efisiensi atau dan produktivitas suatu bank digunakan pendekatan parametrik dan non parametrik (Muliaman D. Hadad, dkk, 2003).

Menurut Sari Yuniarti (2008) awalnya evaluasi kinerja efisiensi diukur pula dengan menggunakan rasio keuangan, tetapi menurut beberapa pakar penilaian efisiensi tidak bisa dilakukan secara parsial tetapi harus memperhitungkan seluruh *output* dan *input* yang ada. Maka digunakan pendekatan parametrik dan non parametrik. Pendekatan *parametrik* meliputi *Stochastic Frontier Approach* (SFA), *Distribution Free Approach* (DFA), dan *Thick Frontier Approach* (TFA). Sedangkan pendekatan *non-parametrik* meliputi pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA) dan *Free Disposal Hull* (FDH).

Berdasarkan kelima metode tersebut, maka hasil penelitian Berger dan Humphrey (1997) menunjukkan bahwa estimasi efisiensi dari *non-parametrik* (DEA dan FDH) yang diteliti adalah sama hasilnya dengan menggunakan model *parametrik* (SFA, DFA, TFA), tetapi hasil dari *non-parametrik* sedikit lebih rendah rata-rata estimasi efisiensi dan rupanya untuk memiliki lebih besar penyebaran daripada hasil dari model *parametrik*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *parametrik*, dengan menggunakan metode *Stochastic Frontier Approach* (SFA), melalui asumsi keuntungan (*alternative profit efficiency*), karena terjadi pada pasar persaingan tidak sempurna (*imperfect market competition*). Pada kondisi pasar yang seperti ini, maka bank diasumsikan memiliki *market power* dalam menentukan harga *output* namun tidak pada harga *input*.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data keuangan perbankan syariah yang diperoleh dari Bank Indonesia. Penentuan variabel pada penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan *value added approach*, yaitu penentuan variabel bank berdasarkan tujuan bank untuk menghasilkan nilai tambah (keuntungan) yang maksimal. *Profit* dalam metode ini dipengaruhi oleh fungsi *aktiva* dan *pasiva*, adapun variabel digunakan dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga, Modal Disetor, Pembiayaan yang Diberikan, Penempatan pada Bank Indonesia, dan Penempatan pada Bank Lain.

Berdasarkan paparan tersebut, maka penulis mempunyai gagasan untuk meneliti efisiensi bank umum syariah mulai tahun 2010 dikarenakan pada tahun tersebut sudah mulai pulih perekonomian di Indonesia setelah krisis 2008, dan yang mana pula tahun tersebut mulai bisa dijadikan acuan standar efisiensi bank umum syariah di Indonesia, serta menganalisis variabel yang dapat mempengaruhi *profit* (keuntungan) Bank Umum Syariah di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap tingkat efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia?
2. Apakah Modal Disetor (MD) berpengaruh terhadap tingkat efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia ?
3. Apakah Penempatan pada Bank Indonesia (PBI) berpengaruh terhadap tingkat efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia ?
4. Apakah Penempatan pada Bank lain (PBL) berpengaruh terhadap tingkat efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia ?
5. Apakah Pembiayaan Yang Diberikan (PD) berpengaruh terhadap tingkat efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap tingkat efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia
2. Menganalisis pengaruh Modal Disetor (MD) terhadap tingkat efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia
3. Menganalisis pengaruh Penempatan pada Bank Indonesia (PBI) terhadap tingkat efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia
4. Menganalisis pengaruh Penempatan pada Bank Lain (PBL) terhadap tingkat efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia

5. Menganalisis pengaruh Pembiayaan Yang Diberikan (PD)) terhadap tingkat efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia

D. Batasan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan tujuan penelitian diatas, maka penelitian dibatasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia (BUS) periode Januari 2010 sampai dengan Desember 2014. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada Dana Pihak Ketiga, Modal Disetor, Penempatan pada Bank Indonesia, Penempatan pada Bank lain, dan Pembiayaan yang Diberikan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis, sebagai proses pembelajaran yang memberi tambahan pengetahuan serta pengalaman sehingga penulis dapat mengembangkan ilmu yang didapat di program studi Ekonomi dan Perbankan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bagi peneliti, menjadi sumber referensi bagi peneliti yang sedang melakukan evaluasi atau mengatasi masalah yang sama dan memberikan bahan acuan bagi penelitian sejenis untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi Bank Umum Syariah, penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak perbankan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam mengembangkan dunia perbankan syariah kedepan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan akan diuraikan secara garis besar isi dari setiap bab agar dapat memberikan sedikit gambaran mengenai isi skripsi ini, diantaranya:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan metode penelitian apa yang digunakan dalam penelitian ini. Dimana, terdiri dari beberapa sub bab yaitu jenis penelitian, populasi dan sample, gambaran umum objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan metode analisis data.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas dan menganalisis data yang telah diperoleh dengan alat analisis untuk pembuktian hipotesis serta interpretasi hasil analisis.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang didasarkan atas analisis yang telah dilakukan.